

IMPLEMENTASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI

IMPLEMENTATION OF TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH INDIVIDUAL ANNUAL TAX REPORTING

Safria Syarifuddin^{1*}, Ilham¹, Rukminih Arifin¹, Sri Nirmala Sari¹,
Veronika Sari Denka¹, Ardyansyah Gisda¹

¹Jurusan Perpajakan, Politeknik Bosowa

*Email korespondensi: safria@politeknikbosowa.ac.id

Abstract

This tax volunteer internship activity aims to provide real contributions to the assistance and reporting services for Individual Annual Tax Returns at the South Sulawesi Regional Kanwil DJP. With assistance and training for taxpayers related to accessing the official website of the Directorate General of Taxes (DJP), djp.online.pajak.go.id, and filling out the SPT OP. I trust that taxpayers at the South Sulawesi Kanwil DJP can enhance their awareness of income tax reporting, thereby expanding state revenue and promoting economic growth in Indonesia. Additionally, through this assistance, I aim to share knowledge with taxpayers, enabling them to report their income tax autonomously. With the presence of charge volunteers who contribute, it is expected that taxpayers at the Kanwil DJP of South Sulawesi can effectively recognize and comply with tax controls applied in Indonesia, so that it can have a positive impact on the assess economy and citizen welfare. This study gives a comprehensive insight into the collaboration between charge volunteers and officials from the teaching, and can at that point optimize the viability of assistance and socialization activities, as well as tax education. Taxpayer compliance and e-filing mechanisms are still obstacles to submitting annual tax returns. One of the strategies for Tax Mindfulness Inclusion in Education is the charge volunteer program. Bosowa Polytechnic is actively involved in implementing this tax volunteer program through a community service program. Annual Tax Returns and Periodic Tax Returns for PPh OP.

Keywords: Tax Volunteers, Annual Tax Returns, Tax Awareness.

Abstrak

Kegiatan magang relawan pajak ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan asistensi dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Dengan pendampingan dan pelatihan kepada wajib pajak yang berkaitan dengan akses masuk web resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yaitu djp.online.pajak.go.id. serta pengisian SPT OP. Saya berharap wajib pajak di Kanwil DJP Sulawesi Selatan dapat memperkuat kesadaran wajib pajak tentang pelaporan pajak penghasilan, meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, melalui pendampingan ini, saya berusaha untuk berbagi pengetahuan kepada wajib pajak agar mereka dapat secara mandiri dalam melakukan pelaporan pajak penghasilannya. Dengan adanya relawan pajak yang berkontribusi, diharapkan wajib pajak di Kanwil DJP SULSEL dapat secara mudah mengenal dan mematuhi peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi perpajakan serta kesejahteraan wajib pajak. Studi ini memberikan wawasan secara komprehensif tentang kolaborasi antara relawan pajak dan pejabat dari lembaga pajak kemudian dapat mengoptimalkan efektivitas kegiatan pendampingan dan sosialisasi serta edukasi perpajakan. Masih terdapat kendala dalam kepatuhan wajib pajak serta mekanisme e-filing yang mempengaruhi pengajuan SPT tahunan. Program relawan pajak merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan Kesadaran Pajak melalui Inklusi di bidang Pendidikan. Pelaksanaan relawan pajak ini juga melibatkan partisipasi aktif dari Politeknik Bosowa melalui program pengabdian kepada masyarakat. SPT Tahunan maupun SPT Masa yang harus dilaporkan untuk PPh OP.

Kata kunci: Relawan Pajak, SPT Tahunan, Kesadaran Pajak.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2025 Author

Diterima: 1 Juni 2025; Disetujui: 28 Juni 2025; Terbit: 28 Juni 2025

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia pasca kemerdekaan dijelaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib untuk keperluan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Seperti di masa lalu, pajak di Indonesia digunakan untuk mendukung kemajuan nasional di berbagai bidang seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Misalnya, pajak mencakup pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, penyediaan vaksin, pendidikan gratis bagi masyarakat, dan lain-lain.

Pajak adalah kontribusi kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (berarti wajib), tanpa imbalan langsung (kontra-kinerja) yang dapat diamati secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Resmi, 2017). Definisi ini menunjukkan bahwa warga negara harus membayar pajak kepada pemerintah. Fungsi pajak bersifat anggaran (sumber keuangan negara), di mana pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan pengeluaran pemerintah; dan fungsi pengaturan, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengelola atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi (Waluyo, 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk penerapan pendaftaran NIK-NPWP dan revisi ketentuan PPH 21. Tujuan pencocokan NIK dan NPWP adalah untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam administrasi perpajakan serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, langkah ini diambil untuk mendorong keadilan dan menciptakan administrasi perpajakan yang efektif serta efisien bagi wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP (Pajak.go.id, 2024).

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan e-Filing sebaiknya menghubungi KPP terdekat untuk mendapatkan bantuan. Namun demikian, sebagian Wajib Pajak merasa kurang nyaman ketika harus membahas pengisian SPT dengan petugas pajak. Agar dapat mengatasi hal tersebut, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DJP menjalin kerjasama dengan Tax Center di Perguruan Tinggi untuk mengumpulkan Relawan Pajak (Nasly, 2024).

Pendapatan negara yang utama berasal dari pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional. Sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih belum optimal. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat pelaporan SPT Tahunan WPOP mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan di beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala baik dari sisi pemahaman, kesadaran, maupun kemudahan akses terhadap sistem pelaporan seperti e-Filing (Rahayu, 2017).

Upaya pemerintah melalui digitalisasi layanan perpajakan, sosialisasi, dan program relawan pajak telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan. Namun, efektivitas dari implementasi kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pelaporan SPT Tahunan dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan WPOP.

Relawan Pajak adalah individu yang berasal dari mahasiswa perguruan tinggi maupun akademisi atau pengajar yang telah direkrut dan dilatih untuk mendukung Wajib Pajak dalam proses pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Aribowo et al., 2020). Pendampingan akan disediakan kepada Wajib Pajak untuk membantu mereka mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan melalui platform DJP online.

METODE

Program ini memungkinkan mahasiswa untuk menjadi relawan pajak dan membantu wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pada tahun 2023, DJP memperkenalkan aplikasi Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani), yang memudahkan mahasiswa untuk mendaftar secara daring dan berpartisipasi dalam program ini melalui tax center kampus yang telah bekerja sama dengan DJP. Aplikasi Renjani (Relawan

Pajak untuk Negeri) benar-benar membawa inovasi dalam program Relawan Pajak. Dengan adanya Renjani, mahasiswa dapat mendaftar secara daring dan berpartisipasi lebih mudah dalam membantu masyarakat dalam pelaporan pajak.

Aplikasi Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) benar-benar membawa inovasi dalam program Relawan Pajak. Dengan adanya Renjani, mahasiswa dapat mendaftar secara daring dan berpartisipasi lebih mudah dalam membantu masyarakat dalam pelaporan pajak. Pendaftaran daring memungkinkan mahasiswa untuk bergabung melalui aplikasi tanpa perlu registrasi manual. 000 relawan pajak telah bergabung dan tersebar di lebih dari 400 tax center di Indonesia.

Asistensi SPT Tahunan: Membantu wajib pajak dalam pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terutama melalui e-Filing. Pendampingan Business Development Services (BDS) Memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam memahami aspek perpajakan yang relevan. Penyebarluasan Konten Perpajakan Membantu dalam distribusi informasi perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media. (Nur, 2022)

Sertifikat Relawan Pajak: diberikan kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam program Relawan Pajak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sertifikat ini menjadi bukti kontribusi mereka dalam membantu wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat. Pengakuan resmi dari DJP atas partisipasi dalam program edukasi perpajakan. (Kemenkeu., n.d.) Nilai tambah dalam CV untuk mahasiswa yang ingin berkarier di bidang perpajakan, keuangan, atau administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan dan memperkenalkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak mulai tahun 2024, selain itu juga mendukung validasi NIK menjadi NPWP dan kegiatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tentukan jumlah relawan yang dibutuhkan serta umumkan proses rekrutmen untuk

mendapatkan relawan pajak sesuai kebutuhan. Langkah pertama dalam perekrutan **relawan pajak** adalah **identifikasi kebutuhan**, yang mencakup:

- a. **Analisis kebutuhan relawan:** Menentukan jumlah dan keahlian relawan yang diperlukan berdasarkan target edukasi pajak dan wilayah operasional.
 - b. **Strategi rekrutmen:** Menyusun metode perekrutan, seperti melalui media sosial, kampus, atau komunitas profesional.
 - c. **Pengumuman rekrutmen:** Membuat publikasi yang menarik, termasuk syarat pendaftaran, manfaat menjadi relawan, dan mekanisme seleksi.
2. Pemetaan kemampuan relawan, penyiapan kurikulum untuk mengukur pemahaman relawan atas materi; Berikut tahapan yang bisa dilakukan:
- a. Pemetaan Kemampuan Relawan
 - ✓ Tes Awal: Mengukur pemahaman relawan tentang konsep dasar perpajakan, seperti PPh Pasal 21, PPN, dan aturan pajak lainnya.
 - ✓ Kategori Kemampuan: Mengelompokkan relawan berdasarkan tingkat pemahaman (Pemula, Menengah, Mahir).
 - ✓ Penyesuaian Peran: Menentukan tugas yang sesuai, seperti edukasi langsung, pembuatan materi, atau pendampingan konsultasi pajak.
 - b. Penyiapan Kurikulum
 - ✓ Materi Dasar: Pengantar perpajakan, sistem perpajakan nasional, dan regulasi yang berlaku.
 - ✓ Materi Lanjutan: Studi kasus, perhitungan pajak, serta penerapan aturan dalam situasi nyata.
 - ✓ Metode Evaluasi: Tes berkala, simulasi interaktif, atau sesi diskusi untuk mengukur pemahaman relawan.
3. Pelaksanaan pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendampingan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi bertujuan untuk membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat. Berikut langkah-langkah pelaksanaannya:
- a. Identifikasi Kebutuhan Wajib Pajak
 - ✓ Menyusun profil Wajib Pajak berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap pajak.

- ✓ Mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan, seperti pengisian SPT, perhitungan pajak, atau pemanfaatan insentif pajak.
- ✓ Menyediakan konsultasi awal untuk menjawab pertanyaan umum dan memberikan panduan.
- b. Penyediaan Materi dan Pelatihan
 - ✓ Mengembangkan modul edukasi yang mencakup ketentuan perpajakan terbaru, tata cara pelaporan, dan simulasi perhitungan pajak.
 - ✓ Melakukan pelatihan langsung atau webinar bagi Wajib Pajak yang ingin memahami perhitungan pajak secara lebih mendalam.
 - ✓ Menyediakan infografis dan panduan praktis agar informasi lebih mudah dicerna.
- c. Pendampingan Langsung
 - ✓ Melakukan pendampingan satu per satu, baik secara daring maupun luring, untuk membantu pengisian SPT dan konsultasi terkait.
 - ✓ Menggunakan simulasi kasus nyata agar Wajib Pajak memahami proses perpajakan dalam konteks mereka.
 - ✓ Memonitor kemajuan dan memberikan feedback berkala agar mereka lebih percaya diri dalam mengelola kewajibannya.
- d. Evaluasi dan Pengembangan Program
 - ✓ Melakukan survey kepuasan untuk mengetahui efektivitas pendampingan.
 - ✓ Menganalisis tantangan yang dihadapi agar pendampingan bisa lebih efektif.
 - ✓ Mengembangkan materi tambahan berdasarkan masukan dari Wajib Pajak.



Gambar 1. Banner Relawan Pajak



Gambar 2. Relawan Pajak Melayani Wajib Pajak



Gambar 3. Relawan Pajak Melayani Wajib Pajak



Gambar 4. Relawan Pajak Politeknik Bosowa



Gambar 5. Relawan Pajak Melayani Wajib Pajak di Tax Center Politeknik Bosowa



Gambar 6. Relawan Pajak Melayani Wajib Pajak

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Politeknik Bosowa terkait pendampingan dan sosialisasi wajib pajak, relawan pajak untuk SPT Orang Pribadi 1770SS, SPT Orang Pribadi 1770S, orang Pribadi 1770 di kanwil DJP Sulawesi Selatan, telah memberikan dampak positif secara signifikan bagi wajib pajak. Selama proses pendampingan dan sosialisasi, terdapat berbagai kendala dan tantangan yang telah dihadapi serta diatasi dengan kerjasama tim relawan pajak dan partisipasi aktif dari wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas anugerah dan petunjuk-Nya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berada di bawah bimbingan dan instruksi Wakil Direktur 1 Politeknik Bosowa. Dukungan pendanaan dari Wakil Direktur 2 Politeknik Bosowa memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan baik. Kami berharap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban tahunan mereka, seperti pembuatan laporan keuangan dan pelaporan Surat Pemberitahuan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan target penerimaan negara dari pajak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53-58.
- Kemenkeu. (n.d.). *Tata Cara Pengembalian Kelebihan dan Pembayaran Pajak*. Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id.
- Nasly, S. (2024). <https://artikel.pajakku.com/cara-mengatasi-error-dalam-pelaporan-spt-di-djp-online/>.
- Nur, T. F. (2022). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan Kemenkeu. *Administrasi Bisnis Terapan*.
- Pajak.go.id. (2024, Juni 7). *Purnomo*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pemadanan-nik-npwp-apa-manfaatnya>
- Rahayu., S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains. .

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
Jakarta: Penerbit Salemba.

Waluyo. (2021). *Akuntansi Pajak Edisi 3*.
Jakarta: Salemba Empat.